MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI RAHA
JL.M.H.THAMRIN NO.33 RAHA KAB. MUNA
SULAWESI TENGGARA
http://www.pn-raha.go.id/
==========

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS 3,96 / 99,12%

Jumlah	117 Responden				
Jenis Kelamin	Laki - laki : 82	Perempuan: 35			
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	SD : 0	SMP : 0	SMU : 44	S3 : 0
		Diploma : 1	S1 : 63	S2 : 9	
Pekerjaan		SWASTA : 47	WIRAUSAHA : 29	TENAGA KONTRAK : 10	
		PNS : 5	TNI : 0	POLRI : 3	
		LAINNYA : 30			

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,949
2. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ? 3,949
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? 3,957

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah

Untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat guna meningkatkan hasil Indeks Persepsi Korupsi terhadap 3 (tiga) nilai unsur terendah diatas maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Untuk Memperbaiki Indikator Percaloan, direkomendasikan**:
   - Ketua Pengadilan menegaskan bawah praktek percalaoan di Pengadilan Negeri Raha dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Raha sudah tidak ada praktek percaloan yang terkajadi;
   - Bahwa dalam pengisian Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) sebagian responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dengan bentuk jawaban multi choise menganggap pilihan pada point A adalah pilihan dengan nilai 4 (empat) tetapi yang sebenarnya pilihan pada point A adalah pilihan dengan nilai 1 (satu);
   - Ketua Pengadilan menghimbau kepada petugas PTSP dan Anggota Tim Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) pada saat masyarakat penerima layanan mendapatkan pelayanan maka diminta untuk melakukan pengisian Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dalam Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) dengan memberitahukan bahwa pertanyaan kuesioner Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dengan bentuk jawaban multi choise dimana pilihan pada point D adalah pilihan dengan nilai 4 (empat), pilihan pada point C adalah pilihan dengan nilai 3 (tiga), pilihan pada point B adalah pilihan dengan nilai 2 (dua) dan pilihan pada point A adalah pilihan nilai 1 (satu);
   - Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi harus terus dilakukan secara berkala;
   - Audio gratifikasi secara rutin dibunyikan setiap 2 (dua) jam sekali;
   - Himbauan anti gratifikasi berdasarkan Lampiran SEMA Nomor 17 Tahun 2019 yang ditempel diatas Meja Majelis Hakim agar selalu dibaca oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan.

2. **Untuk memperbaiki Indikator Transaksi Rahasia, direkomendasikan**:
   - Ketua Pengadilan menegaskan bawah praktek Transaksi Rahasia di Pengadilan Negeri Raha dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Raha sudah tidak terjadi;
   - Bahwa dalam pengisian Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) sebagian responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dengan bentuk jawaban multi choise menganggap pilihan pada point A adalah pilihan dengan nilai 4 (empat) tetapi yang sebenarnya pilihan pada point A adalah pilihan dengan nilai 1 (satu);
   - Ketua Pengadilan menghimbau kepada petugas PTSP dan Anggota Tim Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) pada saat masyarakat penerima layanan mendapatkan pelayanan maka diminta untuk melakukan pengisian Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dalam Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) dengan memberitahukan bahwa pertanyaan kuesioner Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dengan bentuk jawaban multi choise dimana pilihan pada point D adalah pilihan dengan nilai 4 (empat), pilihan pada point C adalah pilihan dengan nilai 3 (tiga), pilihan pada point B adalah pilihan dengan nilai 2 (dua) dan pilihan pada point A adalah pilihan nilai 1 (satu);

- Monitoring dan Evaluasi pengendalian gratifikasi harus terus dilakukan secara berkala;
- Audio gratifikasi secara rutin dibunyikan setiap 2 (dua) jam sekali;
- Himbauan anti gratifikasi berdasarkan Lampiran SEMA Nomor 17 Tahun 2019 yang ditempel diatas Meja Majelis Hakim agar selalu dibaca oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan.

3 **Untuk memperbaiki Indikator Perbuatan Curang, direkomendasika**n:

- Ketua Pengadilan menegaskan bawah praktek perbuatan curang di Pengadilan Negeri Raha dalam pemberian layanan publik dan penanganan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Raha sudah tidak terjadi praktek perbuatan curang (KKN) tersebut;
- Bahwa dalam pengisian Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) sebagian responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dengan bentuk jawaban multi choise menganggap pilihan pada point A adalah pilihan dengan nilai 4 (empat) tetapi yang sebenarnya pilihan pada point A adalah pilihan dengan nilai 1 (satu);
- Ketua Pengadilan menghimbau kepada petugas PTSP dan Anggota Tim Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) pada saat masyarakat penerima layanan mendapatkan pelayanan maka diminta untuk melakukan pengisian Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dalam Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (Sisuper) dengan memberitahukan bahwa pertanyaan kuesioner Survei Presipsi Anti Korupsi (SPAK) dengan bentuk jawaban multi choise dimana pilihan pada point D adalah pilihan dengan nilai 4 (empat), pilihan pada point C adalah pilihan dengan nilai 3 (tiga), pilihan pada point B adalah pilihan dengan nilai 2 (dua) dan pilihan pada point A adalah pilihan nilai 1 (satu);
- Mencantumkan biaya-biaya/tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik pada ruang tunggu sidang maupun pada ruang tunggu PTSP dan dimuat dalam website pengadilan;
- Petugas PTSP maupun petugas informasih selalu memberitahukan biaya yang dikenakan atas pelayanan yang dikenakan biaya setelah memberikan penjelasan terkait dengan layanan yang dibutuhkan.
- Pembayaran yang dilakukan oleh Pengguna Layanan harus selalu menggunakan bukti transaksi pembayaran

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Raha, 04 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Raha

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.
NIP 19780826 200112 1 001